

# **FUNGSI REPARATOIR PADA SANKSI ADMINISTRATIF SEBAGAI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN**

Nama : Paskalis Steven Edrika

Jurusan : Hukum

Pembimbing : Prof. Dr. Lanny Kusumawati, Dra., S.H., M.Hum.

Wafia Silvi Dhesinta Rini., S.H., M.H.

## **ABSTRAK**

Permasalahan di lingkungan hidup semakin hari semakin meningkat. Alih fungsi hutan menjadi lahan pertambangan berdampak pada kondisi lingkungan. Seperti dalam kasus yang terjadi, yaitu tindakan PT. X yang melakukan pencemaran lingkungan dan melakukan dumping (pembuangan) limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin. Hingga saat ini PT.X masih belum mendapatkan sanksi atas tindakannya yang melanggar peraturan perundang-undangan. Atas tindakan PT. X maka diperlukan penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran lingkungan melalui pengenaan sanksi administratif yang memiliki fungsi reparatoir. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan paksaan pemerintah (bestuurdwang), dalam bentuk penghentian sementara kegiatan produksi dan tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup, memenuhi fungsi reparatoir yang dimaknai sebagai salah satu jenis sanksi administratif, diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula.

Kata kunci : fungsi reparatoir, sanksi administratif, penegakan hukum, pencemaran lingkungan

# THE REPARATOIR FUNCTION OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS AS LAW ENFORCEMENT FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION

*Name* : Paskalis Steven Edrika

*Major* : Hukum

*Contributor* : Prof. Dr. Lanny Kusumawati, Dra., S.H., M.Hum.

Wafia Silvi Dhesinta Rini., S.H., M.H.

## ABSTRACT

*Problems in the environment are increasing everyday. The conversion of forest to mining land has an impact on environmental conditions. As in the case that occurred, the action of PT.X which polluted the environment and dumped waste into environmental media without a permit. Until now PT.X still has not received sanctions for its actions that violate laws and regulations. For the actions of PT.X, it is necessary to enforce environmental law against environmental pollution through the imposition of administrative sanctions that have a reparatoir function. The research method used is normative juridical research. The results showed that through the imposition of administrative sanctions in the form of written warnings and government coercion (bestuurdwang), in the form of temporary suspension of production activities and other actions aimed at stopping violations and actions to restore environmental functions, fulfills the reparatoir function which is interpreted as one type of administrative sanction, applied as a reaction to norm violations aimed at restoring to normal conditions.*

**Keywords** : *reparatoir function, administrative sanctions, law enforcement, environmental pollution*